

## **CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY : STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM DALAM PERLINDUNGAN ANAK PUTUS SEKOLAH**

**Ali Abdul Wakhid<sup>1</sup>, Abdul Qohar<sup>2</sup>, Liky Faizal<sup>3</sup>**

UIN Raden Intan Lampung<sup>1,2,3</sup>

[aliabdulwakhid@radenintan.ac.id](mailto:aliabdulwakhid@radenintan.ac.id), [abdulqohar@radenintan.ac.id](mailto:abdulqohar@radenintan.ac.id),  
[likyfaizal@radenintan.ac.id](mailto:likyfaizal@radenintan.ac.id)

Diterima: 12 November 2023    Disetujui: 08 Desember 2024    Dipublikasikan: 24 Desember 2024

### ***Abstract***

*The issue of school dropouts remains an unresolved problem to this day. The Campus Social Responsibility program is an initiative aimed at addressing school dropout issues in Lampung Province, in line with the implementation of Lampung Governor Regulation No. 1 of 2021 on Child Protection. This study explains the policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province. The research uses a qualitative approach with a multiple case design and a single-unit analysis. Data were collected through in-depth and group interviews as well as document analysis. In-depth and group interviews were conducted with 15 subjects. Data was also gathered through document analysis of various policy documents related to the Campus Social Responsibility program for the protection of school dropouts. The results of the study show that there are three policy strategies of the Campus Social Responsibility program in protecting school dropouts in Lampung Province: monitoring, facilitating the payment of education fees for underprivileged children. The impact of the Campus Social Responsibility program's policy implementation in protecting school dropouts in Lampung Province has brought about changes, including a reduction in the number of school dropouts, children at risk of dropping out, unemployment, and poverty.*

**Keywords:** Program, CSR, school dropouts

### ***Abstrak***

Masalah putus sekolah yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan. Campus Social Responsibility adalah program pengentasan masalah putus sekolah di Provinsi Lampung yang ditujukan untuk mengimplementasikan Peraturan Gubernur Lampung nomor 1 tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menjelaskan Strategi kebijakan program Campus Social Responsibility dalam perlindungan anak putus sekolah di Provinsi Lampung. Penelitian dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian multiple case design single-unit of analysis. Data dikumpulkan melalui in-depth dan group interview serta analisis dokumen. In-depth dan group interview dilakukan kepada 15 orang subjek. Penggalan data melalui analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen kebijakan program Campus Social Responsibility dalam perlindungan anak putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 (Tiga) Strategi kebijakan program Campus Social Responsibility dalam perlindungan anak putus sekolah di Provinsi Lampung yaitu monitoring, memfasilitasi tunggakan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu. Dampak pelaksanaan kebijakan program Campus Social Responsibility dalam perlindungan anak putus sekolah di Provinsi Lampung telah membuat perubahan dimana perubahan tersebut mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah serta mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi jumlah kemiskinan.

**Kata Kunci:** Program, CSR, anak putus sekolah

## A. PENDAHULUAN

Masalah putus sekolah merupakan isu sosial yang terus menjadi perhatian utama di berbagai daerah, termasuk Provinsi Lampung. Artikel ini mengangkat persoalan ini dengan mengaitkannya pada perlunya upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak. Inisiatif *Campus Social Responsibility (CSR)* menjadi solusi yang diterapkan untuk mengentaskan masalah putus sekolah, menjadikannya fokus utama penelitian ini.

Penyebab tingginya angka anak putus sekolah terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal disebabkan kurangnya motivasi dan keinginan belajar dalam diri siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal lebih disebabkan karena kurangnya biaya pendidikan dan dukungan keluarga. Permasalahan putus sekolah merupakan penghalang tercapainya pendidikan yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Kondisi sosial ekonomi keluarga di Kota Tangerang mayoritas tergolong dalam kategori ekonomi lemah sehingga mendukung tingginya angka putus sekolah. Kurangnya peran orangtua dalam mendukung anak bersekolah dan tidak meratanya pendataan program pemerintah di bidang pendidikan turut mendukung anak putus sekolah.<sup>2</sup>

Kondisi pendidikan dengan sistem *Learning From Home* menuntut dukungan teknologi yang memadai dalam proses belajar anak sekaligus menjadi beban bagi anak kurang mampu.<sup>3</sup> Terlebih lagi pada anak PMKS di provinsi Lampung, kecenderungan mereka untuk putus sekolah akan berpeluang besar akibat kondisi kesulitan ekonomi yang sangat membebani. *Campus Social Responsibility (CSR)* adalah bentuk program yang ditujukan untuk melakukan pendampingan terhadap anak rentan putus sekolah di Provinsi Lampung sekaligus mengimplementasikan kebijakan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak.<sup>4</sup> Program ini berada di naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung. *Campus Social Responsibility* bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dalam memerangi permasalahan putus sekolah yang dialami anak PMKS.

---

<sup>1</sup> Ridwan, Sholihah, and Wike, "Implementasi Program *Campus Social Responsibility (CSR)* Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah Di Kota Surabaya)."

<sup>2</sup> Saepuloh and Suherman, "Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Di Kota Tangerang."

<sup>3</sup> Scholz and Tietje, *Embedded Case Study Methods*.

<sup>4</sup> Gubernur Lampung, PERGUB NO. 1 Tahun 2021 Tentang KLA Provinsi Lampung.

Program ini cukup membantu penanganan masalah putus sekolah. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afghoni<sup>5</sup> yang menyatakan bahwa dengan adanya program tersebut anak rentan putus sekolah atau dalam kualifikasi anak dalam usia sekolah yang terancam putus sekolah dapat terus melanjutkan sekolahnya. Begitupun pada anak yang telah putus sekolah dapat kembali bersekolah sehingga dapat mengurangi permasalahan putus sekolah di Provinsi Lampung. Selain itu, implementasi program *Campus Social Responsibility* cukup memberikan perubahan pada anak seperti mengubah kepribadian anak menjadi lebih positif, mencegah anak bekerja di usia dini, membentuk kepedulian sosial antar sesama dan lain sebagainya. Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi kebijakan Program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah dan bagaimana dampak pelaksanaan kebijakan program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian *multiple case design single-unit of analysis*<sup>6,7</sup>. *Single-unit of analysis* merujuk pada fenomena Strategi kebijakan program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah. *Multiple case design*<sup>8</sup> merujuk pada proses penggalan data terhadap berbagai sumber pada beberapa tempat yang dijadikan sebagai setting dalam penelitian ini.<sup>9</sup> Untuk konteks penelitian ini adalah Dinas Sosial di Provinsi Lampung. Penggunaan desain penelitian ini adalah untuk mendapatkan data secara mendalam dan komprehensif terkait dengan Strategi kebijakan program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini<sup>10 11 12</sup>.

Data dikumpulkan melalui *in-depth* dan *group interview* serta analisis dokumen.<sup>13</sup> *In-depth dan group interview* dilakukan kepada 15 orang subjek. Eksplorasi data melalui *in-depth interview* dilakukan 2 Orang Ketua Rehabilitasi Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Sedangkan *group interview* dilakukan kepada 6 Orang terdiri dari mahasiswa, 9 Anak PMKS sekolah

---

<sup>5</sup> Al-Afghoni and Prabawati, "Efektivitas Program *Campus Social Responsibility* Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (Studi Pada Pendampingan Mahasiswa Terhadap Anak Putus Sekolah Atau Rawan Putus Sekolah)."

<sup>6</sup> Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*.

<sup>7</sup> Chesebro and Borisoff, "What Makes Qualitative Research Qualitative?"

<sup>8</sup> Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*.

<sup>9</sup> Mason, *Qualitatif Researching*.

<sup>10</sup> Bogdan and Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*.

<sup>11</sup> Baxter, Pamela, and Jack, "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers."

<sup>12</sup> Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method."

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

jenjang SD/SMP/SMA. Penggalan data melalui analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai dokumen pengelolaan kebijakan program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah, seperti; dokumen profil dinas sosial, Peraturan Gubernur Lampung nomor 1 tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak serta panduan dari Dinas Sosial di provinsi Lampung melaksanakan program tersebut. Pendekatan ini memberikan kedalaman data dan memungkinkan triangulasi informasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan tiga strategi utama yang diadopsi dalam pelaksanaan program CSR untuk melindungi anak putus sekolah: *Pertama*, *monitoring* dengan memastikan anak-anak yang rentan terhadap putus sekolah terpantau dengan baik; *Kedua*, Fasilitasi biaya Pendidikan dengan cara membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan menutupi tunggakan biaya pendidikan. Dampak dari kebijakan ini cukup signifikan, terlihat dari berkurangnya angka anak putus sekolah dan anak yang terancam putus sekolah. Selain itu, program ini juga berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung.

#### ***Kebijakan Publik***

Menurut para ahli, kebijakan publik mengandung banyak makna. Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk melakukan sesuatu bahkan tidak melakukan sesuatu termasuk kebijakan.<sup>14</sup> Sedangkan Anderson<sup>15</sup> mengatakan bahwa kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan banyak *stakeholders* untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi kebijakan mengartikan bahwa kebijakan publik mengandung keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan untuk meraih maksud tertentu. Anderson<sup>16</sup> membagi sifat kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

a) Permintaan kebijakan (*policy demands*)

Permintaan kebijakan merupakan tuntutan kebutuhan yang diajukan masyarakat baik individu ataupun kelompok untuk mendesak pemerintah dalam menyelesaikan suatu masalah.

b) Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

---

<sup>14</sup> Dye, *Understanding Public Policy*.

<sup>15</sup> Nurwidyanto and Maksam, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan."

<sup>16</sup> Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.

Keputusan kebijakan adalah keputusan yang telah ditentukan oleh aktor-aktor kebijakan dari berbagai alternatif yang telah melewati pengkajian dalam suatu penyelesaian masalah dan menjadi proses yang sulit karena sering melibatkan pertentangan.

c) Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Pernyataan kebijakan menyangkut sesuatu bersifat formal dari keputusan politik biasanya berbentuk pernyataan pemerintah untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah serta apa yang akan dikerjakan untuk mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.

d) Hasil kebijakan (*policy outputs*)

Hasil kebijakan merupakan bagian akhir dari formulasi dimana pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk melaksanakan kebijakan.

e) Keluaran Kebijakan (*policy outcome*)

Keluaran kebijakan adalah bagian dari hasil kebijakanyang dirasakan oleh masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemahaman umum implementasi kebijakan dikemukakan Grindle<sup>17</sup> sebagai proses tindakan administratif melalui sebuah program. Sebuah implementasi dapat dimulai jika tujuan dan sasaran telah ditetapkan dan program telah didukung oleh persiapan yang memadai. Implementasi kebijakan adalah proses yang paling dapat diasakan dan seringkali implementasi juga dapat mengalami kegagalan. Terdapat tiga penyebab kegagalan implementasi, yaitu bad execution adalah eksekusi yang buruk akibat ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan. Bad policy adalah kebijakan yang tidak didasari informasi yang memadai dan bad luck adalah kegagalan kebijakan akibat faktor eksternal yang merugikan.<sup>18</sup> Lebih lanjut Hogwood & Gunn<sup>19</sup> menyatakan bahwa untuk menghindari kegagalan implementasi, maka diperlukan implementasi sempurna (perfect implementation) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal tidak menimbulkan gangguan serius. Artinya hambatan kebijakan seringkali beradadiluang jangkauan wewenang badan pelaksana. Biasanya faktor eksternal dapat disebabkan oleh hal yang bersifat fisik ataupun politis;

---

<sup>17</sup> Akib, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana."

<sup>18</sup> Hoogwood and Gunn, *Policy Analysis for the Real World*.

<sup>19</sup> Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*.

- 2) Tersedia waktu yang cukup dan sumber daya yang memadai. Maksudnya kebijakan tidak boleh berharappada waktu yang terlalu pendek. Terlebih lagi penyediaan sarana dan prasarana harus mendukung guna pencapaian hasil yang optimal;
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Hal ini menjamin ketersediaan sumber-sumber dalam pelaksanaan program harus benar-benar telah diperhitungkan;
- 4) Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas. Seringkali kebijakan yang gagal bukan berarti diimplementasikan secara sembrono melainkan dapat juga disebabkan kebijakan itu sendiri yang kurang baik akan pemahaman yang kurang mengenai persoalan yang akan ditanggulangi;
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan sedikit mata rantai penghubungnya. Ini memperingatkan bahwa kebijakan yang memiliki hubungan sebab akibat yang panjang maka akan mudah sekali mengalami kegagalan;
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Untuk meminimalisir kegagalan implementasi maka sebuah instansi tidak boleh banyak bergantung pada instansi lainnya jika pun hal ini harus dilibatkan maka ketergantungan tersebut harus bersifat minimal;
- 7) Pemahaman mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Artinya pemahaman akan tujuan yang akan dicapai harus dipertahankan selama proses implementasi dengan tujuan yang dirumuskan secara jelas spesifik dan telah disepakati oleh seluruh pihak;
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Ini mengandung makna bahwa menungkingkan untuk merinci dan menyusun kembali urutan tugas-tugas oleh setiap pihak untuk mencapai implementasi yang optimal;
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Persyaratan ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi diantara berbagai unsur pelaksana yang terlibat; dan
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Artinya mereka yang memiliki kekuasaan dan wewenang dapat menuntut pihak-pihak lain untuk meningkatkan kerjasamanya dalam sebuah program.

Implementasi kebijakan membawa dampak yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Dampak kebijakan adalah akibat-akibat atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.

Sehingga dalam hal ini dampak berpengaruh terhadap segala tatanan kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan dapat berbeda-beda dimana Dye<sup>21</sup> membagi dampak yang berpengaruh dalam kondisi dunia nyata pada keberlangsungan kelompok sasaran, kelompok selain target dan kondisi saat ini maupun yang akan datang. Uraian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: *Pertama*, dampak yang terjadi pada kelompok sasaran merupakan dampak yang diidentifikasi dari efek program kepada target yang menjadi bagian dari populasi meliputi perubahan pengetahuan, sikap, kesadaran, minat dan perilaku mereka. *Kedua*, dampak pada kelompok selain target adalah dampak yang dirasakan oleh kelompok non sasaran yang biasanya memiliki efek yang berbeda pada segmen populasi. *Ketiga*, dampak yang terjadi pada masa depan ataupun kondisi saat ini merupakan dampak yang diidentifikasi berdasarkan efek-efek yang terjadi apakah senantiasa kebermanfaatannya yang dirasakan bersifat jangka pendek atau jangka panjang.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak memberikan taraf perubahan yang berbeda-beda bagi setiap kelompok. Umumnya kelompok sasaran sebagai target kebijakan cenderung merasakan dampak yang signifikan atas keberlangsungan implementasi program.

### ***Campus Social Responsibility***

*Campus Social Responsibility* adalah program pemerintah Provinsi Lampung untuk merealisasikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak. Program ini berada di bawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan tujuan memberikan pendampingan kepada anak PMKS rentan putus sekolah atau telah putus sekolah agar tetap dapat bersekolah dan tercapainya perubahan perilaku yang sesuai dengan norma-norma masyarakat.

Program *Campus Social Responsibility* bekerjasama dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan melibatkan mahasiswa sebagai tenaga pendampingan (*volunteer*). Mengutip dari Afghoni & Prabawati<sup>22</sup> umumnya program *Campus Social Responsibility* terdiri dari lima tahap kegiatan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Dinas Sosial Provinsi Lampung melakukan sosialisasi kepada seluruh kecamatan sekaligus melakukan pendataan anak PMKS rentan putus sekolah di tiap kecamatan. Sosialisasi juga dilakukan pada perguruan tinggi negeri ataupun swasta di Provinsi Lampung dengan mengadakan rekrutmen mahasiswa sebagai *volunteer* pendampingan; *Kedua*, kegiatan gathering adalah usaha Dinas Sosial Provinsi

---

<sup>21</sup> Dye, *Understanding Public Policy*.

<sup>22</sup> Al-Afghoni and Prabawati, "Efektivitas Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (Studi Pada Pendampingan Mahasiswa Terhadap Anak Putus Sekolah Atau Rawan Putus Sekolah)."

Lampung untuk mempertemukan mahasiswa dan anak PMKS yang akan memperoleh pendampingan. Biasanya kegiatan ini bernuansa acara besar berbentuk outbound; *Ketiga*, pelatihan/ bimbingan teknis. Dalam hal ini para volunteer dibekali materi teknis cara pendampingan, konseling dasar, pola asuh dan psikologi perkembangan anak; *Keempat*, melakukan proses pendampingan, *monitoring* dan evaluasi program. Ini adalah upaya dilapangan. Selain melakukan pendampingan secara rutin volunteer memberikan laporan tertulis yang diserahkan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung. Selain itu pada tahap ini juga dilakukan pemantauan dan evaluasi agar program tetap berjalan dengan baik; dan *Kelima*, *Youth Competition* merupakan bentuk kegiatan terakhir *kegiatan Campus Social Responsibility* sebagai bentuk apresiasi Dinas Sosial terhadap proses yang telah dilalui oleh mahasiswa. Kegiatan ini memperebutkan kategori mahasiswa terbaik dan perguruan tinggi terbaik selama program berlangsung.

Selain itu Dinas Sosial memberikan fasilitas biaya pendidikan bagi anak PMKS yang memiliki tunggakan pada tingkat SD dan SMP. Selanjutnya dilakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung untuk menghimpun permasalahan rentan putus sekolah.

#### ***Strategi Kebijakan Program Campus Social Responsibility Dalam Perlindungan Anak Putus Sekolah***

Menjamin kehidupan anak telah menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan hak-hak anak adalah investasi masa depan yang telah sewajarnya harus direalisasikan mulai dari saat ini. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Anak telah menjamin perlindungan anak tanpa terkecuali, khususnya anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dalam Peraturan Gubernur tersebut anak PMKS menjadi salah satu sasaran untuk memperoleh kesejahteraan sosial melalui beberapa penyediaan layanan.

Ketersediaan beberapa layanan tersebut sangat membantu anak PMKS dalam menangani permasalahan sosial yang ada. *Campus Social Responsibility* adalah salah satu bentuk implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dalam memberikan layanan kesejahteraan sosial yang terfokus pada penanganan anak rentan putus sekolah. Melalui program yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Lampung, masalah putus sekolah diharapkan dapat terselesaikan sampai pada akar masalahnya. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dalam menangani masalah anak rentan putus sekolah dilakukan tidak sebatas memberikan sebuah cara melalui kegiatan pendampingan yang dilakukan dalam program *Campus Social Responsibility*. Namun disisi lain juga memberikan solusi atas pemecahan masalah yang menyebabkan anak harus terancam putus sekolah.



Berbeda masalah yang dihadapi setiap anak rentan putus sekolah juga berbeda upaya yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam menangani penyebabnya. Intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam mengentaskan masalah anak rentan putus sekolah ditanggulangi dengan upaya yang berbeda-beda sesuai dengan masalah apa yang terjadi pada setiap anak. Sehingga program *Campus Social Responsibility* tidak hanya menyangkut upaya pendampingan belajar namun juga menjadi layanan dalam membantu faktor-faktor yang menghambat anak untuk bersekolah. Disamping itu, temuan kendala yang terjadi pada setiap anak dalam masalah pendidikan tidak terlepas dari kontribusi mahasiswa sebagai *volunteer* pendampingan yang terlibat pada program tersebut. Para mahasiswa tersebut berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Provinsi Lampung yang telah terseleksi dalam open recruitment program. Kerjasama yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung bersama Perguruan Tinggi Negeri/Swasta merupakan bentuk kepedulian antar sesama sekaligus memanfaatkan potensi yang ada.

Adapun strategi implementasi program *Campus Social Responsibility* yang diambil Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam membantu masalah putus sekolah meliputi:

- Melakukan Monitoring  
Kegiatan mentoring tidak terlepas dari kerjasama Kelurahan dan Kecamatan bersama Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Memfasilitasi Biaya Pendidikan yang Memiliki Tunggakan  
Fasilitas bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan pada anak rentan putus sekolah setingkat SD dan SMP yang memiliki tunggakan. Tingkat SD dan SMP dipilih karena domain pendidikan tersebut mencakup domain dari Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan tingkat SMA adalah domain dari Pemerintah Provinsi. Tunggakan biaya pendidikan biasanya meliputi tunggakan pembiayaan buku, Lembar Kerja Siswa (LKS) ataupun pembiayaan lain yang membebankan.
- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung  
Menyangkut permasalahan pendidikan maka Dinas Sosial Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung terkait solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh anak rentan putus sekolah di bidang pendidikan. Koordinasi yang dilakukan Dinas Sosial Provinsi Lampung bersama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung meliputi pembebasan biaya pungutan bagi siswa tidak mampu, mutasi siswa, dan permasalahan ijazah.

### ***Dampak Kebijakan Program Campus Social Responsibility Dalam Perlindungan Anak Putus Sekolah***

Perubahan merupakan transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, yakni menuju keadaan yang lebih baik. Dalam penelitian ini program *Campus Social Responsibility* telah membuat perubahan dimana perubahan tersebut mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah serta mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi jumlah kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan ada dampak terkait kebijakan program campus social responsibility dalam perlindungan anak putus sekolah yaitu:

- **Perubahan Nilai Masyarakat, Orangtua Dan Anak Rentan Putus Sekolah**

Nilai dapat dikatakan sebagai anggapan masyarakat mengenai program *Campus Social Responsibility* ini berdampak baik atau buruk untuk masyarakat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah adanya program ini. Program *Campus Social Responsibility* membawa beberapa perubahan bagi masyarakat khususnya perubahan positif di mana masyarakat sangat mempedulikan akan pendidikan anak-anak mereka di Zaman yang sangat maju sekarang ini. Secara umum, melalui program *Campus Social Responsibility* ini masyarakat mendapatkan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup mereka terutama dalam hal pendidikan. Program *Campus Social Responsibility* ini merubah penilaian masyarakat tentang pendidikan sekolah anak-anak mereka, dimana penilaian tersebut berubah setelah adanya program ini dimana masyarakat dan orang tua dari anak-anak yang putus sekolah merespon baik tentang adanya program tersebut.

- **Perubahan Sikap Masyarakat, Orangtua Dan Anak Rentan Putus Sekolah**

Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak, misal perasaan simpati atau peduli yang diungkapkan dengan sikap. Dalam penelitian program *Campus Social Responsibility* sikap seperti perasaan simpati atau peduli yang mempengaruhi masyarakat dan individu di Provinsi Lampung. Program *Campus Social Responsibility* ini merubah sikap masyarakat dan orang tua serta anak-anak yang mengalami putus sekolah, sikap mereka lebih peduli akan pendidikan yang memang pada kenyataannya pendidikan sangat penting untuk generasi saat ini, maka dari itu program ini juga membantu merubah sikap dari orang-orang atau masyarakat yang bersangkutan. sikap masyarakat berubah setelah adanya program ini dimana, dahulu mereka terkesan cuek akan pendidikan anak-anak

mereka namun setelah adanya program ini sikap mereka sangat peduli. Menurut masyarakat dan orangtua mereka merasakan bahwa program ini membuat perubahan sikap yang dulunya mereka cuek saja terhadap pendidikan anak-anak namun sekarang lebih peduli akan pendidikan anak-anak mereka karena memang pendidikan itu sangat penting untuk dijamin maju seperti sekarang ini.

- **Perubahan Pola Perilaku Masyarakat, Orangtua Dan Anak Rentan Putus Sekolah**  
Pola perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu masyarakat dan individu yang dapat diamati. Dalam penelitian program *Campus Social Responsibility* pola perilaku seperti jujur atau disiplin yang mempengaruhi masyarakat dan individu di Provinsi Lampung. Dalam penelitian program *Campus Social Responsibility* pola perilaku seperti jujur atau disiplin yang mempengaruhi masyarakat dan individu di Provinsi Lampung. Program *Campus Social Responsibility* ini merubah pola perilaku anak-anak yang putus sekolah itu menurut tokoh masyarakat, orang tua serta mereka sendiri. Pola perilaku anak tersebut berubah ketika adanya program ini dimana awalnya anak-anak tidak mempedulikan sekolah namun setelah adanya program ini mereka lebih giat dan disiplin untuk sekolah karena memang perubahan tersebut ada karena keinginan mereka sendiri yang ingin lebih maju dan pintar dalam pendidikan mereka sehari-hari.
- **Perubahan Budaya Masyarakat, Orangtua Dan Anak Rentan Putus Sekolah**  
Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam penelitian program *Campus Sosial Responsibility* unsur budaya dapat dinilai dari kuat atau lemahnya dampak perubahan dari unsur budaya di Provinsi Lampung. program *Campus Social Responsibility* ini tidak dapat merubah budaya di masyarakat, orang tua dan anak rentan putus sekolah di Provinsi Lampung. Karena memang budaya susah untuk dirubah karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini bisa dikatakan juga budaya tersebut sudah menjadi tradisi disini. Jadi dapat dikatakan bahwa program ini tidak dapat merubah budaya atau kebiasaan masyarakat disini walaupun program ini sangat memberikan dampak positif bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

### ***Tantangan Dalam Mengimplementasikan Program CSR***

Pelaksanaan *Campus Social Responsibility (CSR)* dalam perlindungan anak putus sekolah menghadapi berbagai tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kolaborasi antara kampus, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Tanpa kerjasama yang solid antar berbagai pihak, program perlindungan anak putus sekolah cenderung terhambat. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dari segi dana maupun tenaga terlatih, menjadi hambatan lain yang signifikan dalam implementasi program. Banyak perguruan tinggi yang ingin membantu, namun sering kali terkendala oleh anggaran yang terbatas untuk menjalankan program jangka panjang. Tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, khususnya di kalangan keluarga yang ekonominya kurang, yang lebih mengutamakan kebutuhan jangka pendek daripada pendidikan anak. Program CSR perlu merancang strategi yang dapat mengubah pola pikir ini, dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pendidikan bagi masa depan anak-anak. Selain itu, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan spesifik anak putus sekolah menjadi persoalan penting. Setiap anak memiliki latar belakang dan tantangan yang berbeda, sehingga program yang terlalu umum tidak selalu efektif. Di sisi lain, stigma sosial yang sering dialami oleh anak-anak putus sekolah juga menjadi hambatan, karena mereka sering merasa terisolasi atau tidak diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, program CSR harus dilengkapi dengan pendekatan psikososial untuk mengatasi dampak tersebut. Infrastruktur yang tidak memadai di beberapa daerah juga menjadi kendala, terutama di wilayah terpencil, di mana akses pendidikan sangat terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, teknologi dapat menjadi solusi efektif, seperti melalui pembelajaran daring yang dapat menjangkau anak-anak di daerah terpencil. Terakhir, tanpa sistem evaluasi yang baik, sulit untuk mengetahui sejauh mana dampak program CSR terhadap anak-anak tersebut. Oleh karena itu, kampus perlu merancang mekanisme evaluasi yang cermat untuk memastikan program ini benar-benar memberikan perubahan positif. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, kampus dapat memainkan peran penting dalam memberikan peluang pendidikan bagi anak-anak yang terpinggirkan, membantu mereka kembali ke jalur pendidikan, dan meraih masa depan yang lebih baik.

### **D. KESIMPULAN**

3 (Tiga) Strategi kebijakan program *Campus Social Responsibility* dalam perlindungan anak putus sekolah di Provinsi Lampung yaitu monitoring, memfasilitasi tunggakan biaya pendidikan bagi anak kurang mampu dan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan

Provinsi Lampung. program Campus Social Responsibility telah membuat perubahan dimana perubahan tersebut mengurangi jumlah anak putus sekolah dan anak terancam putus sekolah serta mengurangi jumlah pengangguran dan juga mengurangi jumlah kemiskinan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta, 2016.
- Akib, Haedar. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 1 (2010): 1–11.
- Al-Afghoni, M. Ainudin, and Indah Prabawati. "Efektivitas Program Campus Social Responsibility Di Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya (Studi Pada Pendampingan Mahasiswa Terhadap Anak Putus Sekolah Atau Rawan Putus Sekolah)." *Publika* 6, no. 9 (2018): 1–7.
- Baxter, Pamela, and Susan Jack. "Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers." *The Qualitative Report* 13, no. 4 (2008): 54–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.1039/c6dt02264b>.
- Bogdan, Robert C., and Sari K. Biklen. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc., 2015.
- Bowen, Glenn A. "Document Analysis as a Qualitative Research Method." *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (January 1, 2009): 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Chesebro, James W, and Deborah J Borisoff. "What Makes Qualitative Research Qualitative ?" *Qualitative Research Reports in Communication* 8, no. 1 (2007): 3–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/17459430701617846>.
- Creswell, John W. *A Concise Introduction to Mixed Methods Research*. California: SAGE Publication, 2014.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
- Gubernur Lampung. PERGUB NO. 1 Tahun 2021 Tentang KLA Provinsi Lampung (2021).
- Hoogwood, Brian W, and LA Gunn. *Policy Analysis for the Real World*. Washington: Oxford University Press, 1984.
- Islamy, I. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Mason, Jennifer. *Qualitatif Researching*. New Delhi: SAGE Publication, 2014.
- Nurwidyanto, Nurwidyanto, and Irfan Ridwan Maksum. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Hak Atas Tanah Bagi Warga Keturunan." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 006, no. 03 (2020): 331–38.

<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2020.006.03.1>.

- Ridwan, Asrifia, Qomariyatus Sholihah, and Wike Wike. "Implementasi Program Campus Social Responsibility (CSR) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pendampingan Anak Rentan Putus Sekolah Di Kota Surabaya)." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 008, no. 01 (2022): 23–34. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.01.3>.
- Saepuloh, Dadang, and Agus Suherman. "Analisis Penyebab Angka Putus Sekolah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Di Kota Tangerang." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 18, no. 2 (2019): 98–111. <https://doi.org/10.33592/pelita.v18i2.45>.
- Scholz, Roland, and Olaf Tietje. *Embedded Case Study Methods*. New York: SAGE Publication, 2012. <https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781412984027>.
- Solichin, A. W. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Yin, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. New York: SAGE Publication, 2017.